

**VERSI REVISI 2025**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
*649/KPN.W24-U2/RA1.10/XII/2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.,

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 03 Desember 2025

**PIHAK KEDUA**

KETUA PENGADILAN TINGGI  
DENPASAR

BAMBANG HERY MULYONO

**PIHAK PERTAMA**

KETUA PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA

I MADE BAGIARTA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025**  
**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                         | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | <b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b> | 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 93%    |
|    |                                                                          | 1.2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                       | 93%    |
|    |                                                                          | 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 93%    |
|    |                                                                          | 1.4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 93%    |
|    |                                                                          | 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.                                                                                  | 93%    |
|    |                                                                          | 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | 37%    |
|    |                                                                          | 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                 | 50%    |
|    |                                                                          | 1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                                        | 5,5%   |
|    |                                                                          | 1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                   | n/a    |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                 |           |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|    |                                                                        | 1.10.Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court                                                                                        | 95%       |  |
|    |                                                                        | 1.11.Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)                                                                                      | 95%       |  |
|    |                                                                        | 1.12.Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)                                                                              | 95%       |  |
| 2. | <b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>           | 2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan                                                                    | 93%       |  |
| 3. | <b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b> | 3.1.Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan                                                                               | 78        |  |
|    |                                                                        | 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIPA 01</li> <li>• DIPA 03</li> </ul> | 96<br>94  |  |
|    |                                                                        | 3.3.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIPA 01</li> <li>• DIPA 03</li> </ul>                                           | 100<br>85 |  |
|    |                                                                        | 3.4.Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                                                                                              | 3.5       |  |

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen  
Administrasi Kesekretariatan Pengadilan  
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Anggaran

Rp 10.515.470.000,-

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 198.350.000,-

Denpasar, 03 Desember 2025

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA



I MADE BAGIARTA

PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
KETUA PENGADILAN TINGGI  
DENPASAR



BAMBANG HERY MULYONO